

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No.4 Tahun 1992). Pemukiman diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam pemukiman. kalau kita menyebut perumahan harus diartikan sebagai wadah fisiknya, sedangkan pemukiman harus kita bayangkan sebagai paduan antara wadah dengan isinya, yaitu manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya, sedangkan prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana dapat diartikan sebagai infrastruktur.

Pemukiman pada garis besarnya terdiri dari berbagai komponen yaitu :

1. Lahan atau tanah yang diperuntukkan untuk pemukiman itu dimana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang dibangun diatas lahan itu.
2. Prasarana pemukiman yaitu jalan lokal, saluran drainase, saluran air kotor, saluran air bersih, persampahan, serta jaringan listrik dan telepon, yang semuanya merupakan komponen infrastruktur yang turut menentukan kualitas pemukiman yang dibangun.
3. Perumahan (tempat tinggal) yang dibangun.
4. Fasilitas umum dan fasilitas sosial, yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, lapangan bermain dan lain-lain dalam lingkungan pemukiman itu.

2.2 Kepadatan Permukiman

Kepadatan permukiman adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan luasannya di suatu wilayah permukiman, dimana penduduknya mengelompok membentuk suatu pola tertentu yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, Pertumbuhan penduduk, Kondisi alam suatu wilayah, Sosial Ekonomi penduduk, Sarana dan prasarana yang tersedia.

Sebagai contoh kepadatan permukiman di kawasan industri, biasanya membentuk suatu pola yang memusat, penduduk yang bermukim di kawasan itu sebagian besar adalah pekerja, sehingga mereka cenderung mencari rumah dengan lokasi yang paling dekat dengan tempatnya bekerja (Maryoto, 2020).

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan permukiman

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan permukiman sebagai berikut :

1. Faktor eksisting

Penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, tanah subur, lingkungan baik, cukup air dan daerah aman.

2. Faktor sosial ekonomi

Tiap-tiap daerah tingkat kesuburan penduduk berbeda-beda, misalnya tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, jenis rumah, atau status kepemilikan rumah .

2.4 Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Untuk menciptakan suatu lingkungan permukiman yang baik maka diperlukan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum permukiman. Adapun yang dimaksud

dengan infrastruktur permukiman ialah jalan lokal, saluran drainase, pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, persampahan, listrik dan telepon (Mustika, 2018).

2.4.1 Drainase

Saluran drainase merupakan prasarana yang melekat dengan lingkungan permukiman, yang gunanya untuk menjaga agar lingkungan tidak tergenang oleh air hujan atau air bersih. Air hujan yang jatuh di suatu daerah perlu dialirkan atau dibuang. Caranya yaitu dengan pembuatan saluran yang dapat menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran di atas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga dihubungkan dengan saluran rumah tangga dan sistem bangunan infrastruktur lainnya (Mustika, 2018).

Tabel 2.1
Bagian jaringan drainase

Sarana	Prasarana
Badan penerima air	Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, danau)
	Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer)
Bangunan pelengkap	Gorong-gorong
	Pertemuan saluran
	Bangunan terjunan
	Jembatan
	Street inlet
	Pompa
	Pintu Air

Sumber : SNI 02-2406-1991, Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.

2.4.2 Air Bersih

Air bersih adalah kebutuhan yang sangat vital bagi penduduk permukiman, yang kegunaannya antara lain untuk keperluan air minum, mandi, memasak, dan termasuk keperluan industri. Pengadaan air bersih di permukiman merupakan urusan pemerintah lokal. Untuk kepentingan manusia, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan (Mustika, 2018).

Tabel 2.2
Penyediaan Air Bersih

Penyediaan jaringan air bersih
Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah
Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass
Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

2.4.3 Persampahan

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sumber sampah perkotaan berasal dari permukiman, pasar, kawasan pertokoan dan perdagangan, kawasan perkantoran dan sarana umum, kawasan industri, peternakan hewan, dan fasilitas umum lainnya. Pembuangan sampah di kota-kota, terutama kota besar menjadi masalah yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena berkaitan erat dengan keindahan kota dan kesehatan masyarakat. Makin besar suatu kota dan makin maju suatu negara maka masalah sampahnya makin sulit, karena jumlah sampah yang diproduksi makin besar. Kegiatan pengelolaan pembuangan sampah ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan (Mustika, 2018).

Jenis sampah perkotaan terdiri atas 2 (dua) yakni sampah organik dan sampah anorganik :

a. Sampah Organik

Sampah Organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Adapun contoh yang termasuk sampah organik adalah sisa sayur dan buah, kotoran hewan, hingga daun kering.

b. Sampah Anorganik

Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi

pengolahan bahan tambang atau sumber dalam dan sulit diuraikan oleh alam, contohnya : botol plastik, tas plastik, kaleng.

Tabel 2.3
Prasana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan		
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi			
Rumah (5 jiwa)	Tong Sampah	Pribadi	-	-		
RW (2500 jiwa)	Gerobak Sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu	
	Bak sampah kecil		6 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak Sampah	TPS	2 m ²		Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³			Mobil mengangkut 3x seminggu
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m		Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m ³			-
Kota (>480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-		Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	-
	Tempat daur ulang sampah		-			-

Sumber : SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan.

2.4.4 Jalan

Infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air. Dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya (Adisasmita, 2012). Ketentuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan jaringan jalan adalah sebagai berikut:

- secara umum sistem jaringan jalan dalam suatu kawasan harus menunjukkan adanya pola jaringan jalan yang jelas antara jalan-jalan utama dengan jalan kolektor, sehingga orientasi dari kawasankawasan fungsional yang ada dapat terstruktur;
- fungsi penghubung dalam peranan jaringan jalan pada suatu kawasan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antar bangunan dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dan lain-lain; dan

- d. pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukung pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dan kejelasan kontinuitas pedestrian.

Tabel 2.4
Klafikasi Jalan

No	Klasifikasi jalan lokal	Lebar jalan minimum (m)	Lebar perkerasan jalan minimum (m)	Lebar bahu jalan minimum (m)	Sempadan bangunan minimum sesuai dengan peraturan daerah setempat	
					Rumah berlantai 2	Rumah berlantai 1
1	Jalan lokal sekunder					
	○ Jalan setapak	2.00	1.20	0.25	2.75	1.75
	○ Jalan Kendaraan	3.50	3.00	0.50	2.75	1.75
2	Jalan lokal sekunder	5.00	4.50	0.50	3.50	2.50
	Sekunder II					
3	Jalan kolektor	7.00	5.00	0.50	4.50	3.50
	Sekunder II					

Sumber : SNI 03-6981-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan

2.5 Infrastruktur Umum pada Suatu Kawasan

Ketersediaan infrastruktur itu sendiri akan mendekati titik kondisi sosial ekonomi akan mempengaruhi ketersediaan infrastruktur pada suatu kawasan permukiman. Tingkat ekonomi yang tinggi pada suatu permukiman, infrastruktur yang tersedia semakin banyak dan lengkap. Sebaliknya, pada permukiman yang tingkat ekonominya rendah, ketersediaan infrastruktur semakin sedikit dan kondisinya buruk. Semakin tinggi tingkat kepadatan, semakin banyak ketersediaan maksimal, ketika sudah tidak bisa lagi melayani permukiman yang semakin padat tersebut. Sehingga perlu perencanaan infrastruktur sebelum dan setelah permukiman itu padat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperhatikan ketersediaan infrastruktur sejak awal khususnya daerah yang kepadatannya masih rendah sebagai calon daerah berkembang. sedangkan untuk daerah dengan kepadatan sedang dan tinggi, ketersediaan infrastruktur perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi mengingat sangat dimungkinkan daerah tersebut akan terus bertambah padat (Mustika, 2018).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ibnu Chairil, Tahun (2015). Tentang Kajian Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Ketersediaan Infrastruktur Studi Kasus di Kota Pontianak. diketahui bahwa pengelompokan pemukiman di wilayah kota Pontianak yang sebagian besar tersebar di daerah pengembangan kota, menyebabkan timbulnya variasi-variasi atau kekhususan antara satu lingkungan pemukiman dengan pemukiman yang lain. Infrastruktur yang meningkat kebutuhannya berdampak menimbulkan tidak optimalnya pelayanan sarana dan prasarana.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fajar mustika, M Isya, Ashfa Achmad, (2018). Tentang Analisis Kepadatan Permukiman Terhadap Pelayanan Infrastruktur Di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kepadatan permukiman berpengaruh negatif terhadap pelayanan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,180. Semakin padat suatu permukiman maka pelayanan infrastruktur di permukiman tersebut semakin kurang baik.

Berikutnya Ashar Annasa , Ria Asih Aryani Soemitrob , Eko Budi Santosoc, Tahun (2018). Tentang Analisis Penentuan Infrastruktur Prioritas Pada Kawasan Kumuh Lingkungan Kerantil Kota Blitar. Dalam penelitian ini kekumuhan kawasan pada Lingkungan Kerantil Kota Blitar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor jalan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan air kotor, persampahan, fisik bangunan, proteksi pemadam kebakaran, Ruang Terbuka Hijau (RTH), peran pemerintah, sosial, ekonomi, peran masyarakat, dan legalitas. Dari berbagai macam faktor penyebab kekumuhan tersebut terdapat beberapa infrastruktur yang diprioritaskan untuk segera mendapatkan penanganannya, diantaranya infrastruktur persampahan (prasarana persampahan, sistem pengelolaan persampahan, kondisi prasarana dan sarana persampahan).

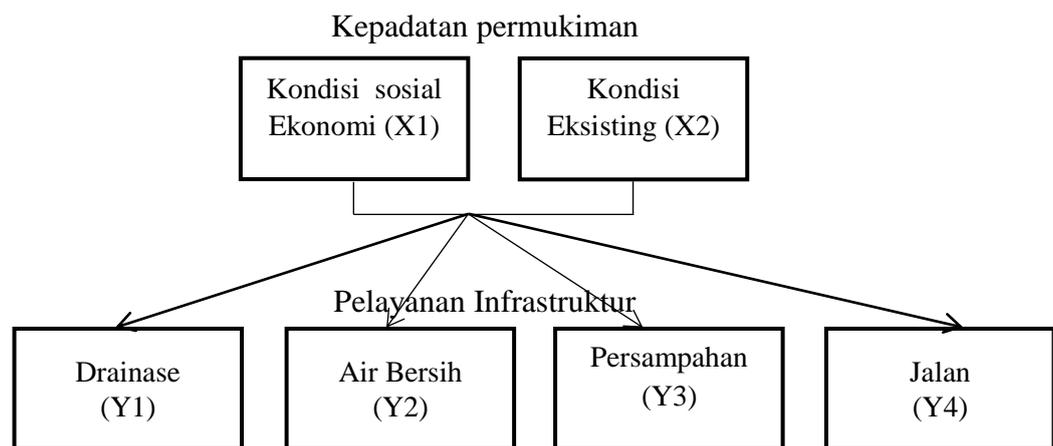
Fajriyanti Ishak, Rieneke L E Sela, Julianus, Tahun (2021). Tentang Evauasi Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kecamatan Oba Tengah. Berdasarkan hasil identifikasi ketersediaan infrastruktur perdesaan yang dapat digunakan dalam mendukung

pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Oba Tengah, ditemukan sembilan infrastruktur perdesaan yang sudah tersedia.

Widya Soviana, Eva Herlina, Saryulis, Tahun (2021). Tentang Identifikasi Dampak Bencana Tsunami Terhadap Permukiman Masyarakat Di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa permukiman masyarakat di Kota Banda Aceh pasca bencana tsunami semakin berkembang dan tertata baik dengan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakatnya.

2.7 Kerangka Pikir

Keterkaitan hubungan antara kepadatan permukiman terhadap pelayanan Infrastruktur dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan kepadatan permukiman yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi dan kondisi eksisting sebagai variabel bebas terhadap pelayanan Infrastruktur yang terdiri dari drainase, air bersih, persampahan, dan jalan sebagai variabel terikat.

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu dalil, tetapi kebenarannya belum diuji secara empiris (Brotowidjoyo, M.D, 1991). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepadatan Permukiman yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi (X1), kondisi eksisting (X2), berpengaruh positif terhadap pelayanan Infrastruktur drainase (Y1).
2. Kepadatan Permukiman yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi (X1), kondisi eksisting (X2), berpengaruh positif terhadap pelayanan Infrastruktur air bersih (Y2).
3. Kepadatan Permukiman yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi (X1), kondisi eksisting (X2), berpengaruh positif terhadap pelayanan Infrastruktur persampahan (Y3).
4. Kepadatan Permukiman yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi (X1), kondisi eksisting (X2), berpengaruh positif terhadap pelayanan Infrastruktur jalan (Y4).